



**Proposal**  
**Pudarnya Kauman :**  
**Studi Perubahan Sosial Masyarakat Islam Tradisional di Surakarta**

**Akhmad Ramdhon**  
**Sosiologi 2002**

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam sejarah perkembangan masyarakat Indonesia, kota-kota tua (yang mempunyai akar sejarah) banyak ditemukan di daerah-daerah pedalaman, muara sungai-sungai besar dan daerah pesisir pantai di kepulauan Jawa, seperti Tuban, Surabaya, Pasuruan, Banten ataupun Cirebon. Dari banyak kota-kota tersebut, kebanyakan mempunyai karakteristik yaitu terletak berdekatan dengan pusat-pusat pemerintahan kekuasaan tradisional. Banyak kasus yang menampakkan fungsi letak tersebut sebagai bentuk pemaksimalan aspek-aspek keamanan sebab kota-kota itu mempunyai fungsi untuk mendistribusikan berbagai macam barang dan jasa, disamping juga kota-kota itu harus menjadi pusat-pusat administrasi bagi otoritas tradisional untuk mengatur wilayah yang ada disekitarnya.

Kota-kota itu sendiri tidaklah muncul dan berkembang secara spontan dari kemauan masyarakat yang ada didalam nya. Namun lokasi, desain dan ukuran kota-kota itu bergantung pada pola pengembangan yang dimiliki oleh pemegang otoritas tradisional tersebut. Untuk beberapa kasus kota-kota di Jawa, pola pembentukannya mengkombinasikan berbagai dimensi, baik politik, ekonomi ataupun budaya. Hal itu tampak dalam relasi antar variabel dalam keberadaan kota-kota tua itu, mulai dari keraton sebagai sentral kekuasaan yang diimbangi dengan keberadaan masjid (tempat beribadah agama Islam) sebagai lambang pemaknaan religiusitas, alun-alun hingga keberadaan pasar sebagai faktor untuk memobilisasi kehidupan ekonomi masyarakatnya. Sehingga suasana yang terbentukpun otomatis penuh dengan nuansa tradisional dan kental akan kekhasan Jawa.

Namun, pasca kedatangan kolonialisme, konstruksi kota-kota di beberapa wilayah mengalami pergeseran terutama terkait dengan berbagai kebijakan kaum kolonial untuk

melakukan dekonstruksi terhadap kebudayaan masyarakat tradisional. Salah satu kebijakan itu adalah, membangun kota-kota di kepulauan Jawa layaknya kota-kota yang ada di kerajaan Belanda. Konsekuensi yang paling dominan dan ada adalah terjadinya pemindahan karakter dan budaya borjuasi Belanda ke Indonesia (dengan berbagai upayanya) dan berimplikasi pada terbangunnya konstruksi baru, dimana yang berkembang kemudian adalah kota Timur yang khas, sebagai bentuk dari proses akulturasi yang sangat instruktif.

Sistem monopoli Hindia Belanda, membuat keberadaan sifat borjuasi Belanda yang bebas, menjadi tidak mungkin. Sehingga bentuk-bentuk administrasi sekalipun lebih bersifat autokratik ketimbang demokratis. Para pegawai kompeni tetap memakai statusnya sebagai pedagang namun cara hidup mereka tidak kurang dari cara hidup bangsawan. Bahkan cara hidup orang-orang kelas bawahpun mengalami proses adaptasi dengan pola perkembangan kota yang semakin modern (*mestizoe*). Dan untuk berbagai bangunan fisik yang ada, kota-kota itu mulai mengalami perombakan dengan masuknya elemen-elemen Eropa bersamaan dengan elemen tradisional (Jawa). Disinilah letak upaya kaum kolonial untuk tetap mempertahankan prestise kolonialisme mereka dalam suatu masyarakat yang didominasi oleh sistem yang feodal. Kolonialisme tidak hanya terefleksi dalam segregasi yang sangat besar dalam tempat tinggal yang ditempati oleh berbagai kelompok penduduk perkotaan, tetapi juga dalam perjuangan mereka untuk memperoleh lingkup kehidupan antara lain terungkap dalam aspek eksternal kota-kota itu (W.F. Wertheim, 1998 : 133-143). Sehingga pasca kekuasaan kolonialisme, kecenderungan untuk melanjutkan pembangunan kota-kota di Indonesia lebih didominasi oleh latar belakang historis seperti yang telah dikemukakan diawal tadi, dimana tradisi kelIndonesiaan tetap

ada, entah bisa dalam bentuk berupa sisa-sisa peninggalan kekuasaan tradisi kemudian pengaruh kolonialisme (Eropa) yang telah meletakkan konsep kota-kota modern dan ditambah dengan beberapa tradisi kaum pendatang yang kemudian mampu untuk tetap eksis bahkan seringkali mereka menjadi pelaku utama dalam roda perekonomian (B.N. Marbun, 1995 : 85)

Agak berbeda dengan kota-kota di Indonesia, arah gerak kota-kota di Eropa sendiri di kategorikan oleh M. Santos, menjadi empat periode dalam sejarah yaitu periode sebelum perdagangan dunia (sebelum abad ke-16), periode perdagangan (yang dimulai abad ke-16), masa revolusi industri dan pergeseran kapital (sejak 1850) dan periode sekarang atau pasca PD II. Dari situ kita ingin membuat sebuah tipologi sederhana tentang arah gerak perkembangan kota-kota tua yang dimulai dari terbentuknya kota-kota tua itu pada masa-masa awal kekuasaan tradisionalisme di bumi nusantara terbangun, yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai perubahan yang akan dialaminya sebagai dampak dari kedatangan kolonialisme. Dampak ekspansi dari kaum kolonial adalah merubah berbagai bentuk tradisionalisme ke arah modernisasi seperti halnya kota-kota di Eropa pasca revolusi industri dan membukakan pintu bagi para pendatang dari Asia untuk kemudian menjadi partner dagang mereka. Setelah masa-masa kemerdekaan kota-kota di Indonesia mulai memasuki masa rekonstruksi baru sesuai dengan semangat kemerdekaan namun tidak sepenuhnya berniat untuk mengubah peninggalan sejarah sebelumnya.

Kota Surakarta sendiri adalah salah satu dari berbagai potret kota-kota tua di Indonesia, yang mengalami proses perubahan terus menerus sehingga terkonstruksi berbagai konsep baru tentang kota Surakarta. Perubahan yang dialami kota Surakarta, meliputi perubahan fisik sebagaimana kota-kota yang mengalami prosesi seperti kota-kota dibagian nusantara

yan lain dan perubahan karakter budaya yang juga tidak dapat dihindari, yang mana kota Surakarta sebagai salah satu wakil kebudayaan Jawa telah mengalami kegagalan dalam mengembangkan dirinya. Banyak fakta sejarah yang menunjukkan kota Surakarta telah kalah dalam dalam menundukkan realitas dunia, karena berbagai kelemahan yang kemudian mampu mengikis kekuatan yang telah mapan sejak tahun 1613 dibawah pimpinan Sultan Agung. Salah satu kelemahan tersebut adalah lemahnya infra struktur politik yang dimiliki oleh budaya Jawa (dalam hal ini diwakili oleh Surakarta). Konflik politik internal antar priyayi yang akut ditambah pukulan telak dengan ekspansi kaum penjajah menyebabkan hilangnya kemampuan sistem budaya Jawa (dan Islam) yang sebelumnya berkembang di Surakarta untuk mengintegrasikan dirinya dalam berbagai perubahan yang ada. Kemudian kondisi ini diikuti segera dengan disfungsi subsistem pendukungnya, yang kemudian mengarah pada lahirnya berbagai kekacauan pada sistem tersebut.

Berulang kali kerusuhan dialami oleh kota Surakarta tanpa ada kemampuan untuk melakukan perlindungan terhadap karakter kebudayaan yang telah dimiliki sebelumnya atau dengan kata lain telah terjadi proses involusi kultural yang luar biasa di kota Surakarta ini. Kegagalan tersebut menjadikan budaya Jawa yang ada, seperti tidak mau mati namun juga untuk tegak dan menegaskan berbagai bingkai kebudayaannya terhadap berbagai bentuk pembusukan kebudayaan juga tidak mampu. Yang terjadi hanyalah berbagai bentuk toleransi kebudayaan dengan mengambil bentuknya masing-masing, entah sofistikasi kebudayaan lewat berbagai proses simbolisme ikon-ikon budaya Jawa, kepasrahan terhadap radikalisme yang kerap melanda hingga diam seribu bahasa terhadap ekspansi modernisasi sejak tahun 70-an yang menjadikan budaya Jawa menjadi sekedar masa peralihan saja untuk kemudian membangun karakter budaya yang

menekankan individualitas, rasionalitas ataupun pragmatisme sebagai postulat dari modernisasi untuk memecah berbagai kearifan lokal yang ada sebelumnya. Dan Kauman adalah bingkai kecil dari potret buram wajah kota Surakarta, yang kental relasi kebudayaannya dengan masa silam yang pernah eksis (karena Kauman dibangun dalam kerangka kejayaan budaya Jawa yang telah mengelaborasi Islam-Hindu ke dalam karakternya yang spesifik) dan sekarang sedang berhadapan dengan berbagai agenda modernitas untuk kemudian mengubahnya menjadi satu karakter kebudayaan yang baru.

Berbagai agenda dari pemerintah kota Surakarta (sebagai representasi dari kekuatan negara) seperti halnya pembangunan kawasan sekitar keraton untuk dijadikan aset wisata, pengembangan unit-unit ekonomi lewat berbagai perangkat modern seperti bank, toko-toko modern, pasar-pasar modern hingga perubahan status Kauman -yang dulunya dimiliki oleh keraton kemudian dilegalkan menjadi aset negara- yang status tanahnya boleh dimiliki oleh individu-individu. Konsekuensi dari pengembangan Balaikota dan keraton menjadi kawasan perdagangan, pada akhirnya memberi dampak pada Kauman secara langsung. Daerah Kauman-pun pada akhirnya ikut mendinamisir dirinya seiring dengan dinamika daerah-daerah di sekitarnya, karena Kauman adalah salah satu bagian dari pengembangan wilayah kota Surakarta secara keseluruhan. Perubahan yang terjadi kemudian meliputi dimensi fisik maupun non fisik entah dalam kerangka sistem nilai, aktivitas ekonomi hingga orientasi perilaku yang dulunya disandarkan pada religi, sekarang akan dilihat proses dan sejauh mana perubahan itu telah terjadi di dalam masyarakat Kauman.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Penelitian ini menyandarkan pada suatu kerangka berpikir yang masih bersifat hipotetik dimana Kauman sebagai suatu masyarakat yang pada awal proses pembentukannya secara sengaja dikonstruksi untuk menjadi bagian dari suatu sistem budaya yang ada yaitu tradisionalisme dan Islam di Surakarta (Mataram), telah mengalami pergeseran. Pergeseran-pergeseran itu merupakan akibat tidak langsung dari arah perubahan masyarakat yaitu dengan mulai terkikisnya kekuatan tradisionalisme untuk kemudian dihadapkan pada satu pilihan tunggal yaitu modernitas.

Kauman sebagai representasi tidak langsung dari kekuatan tradisional yang telah melakukan koalisi dengan agama mampu menjadi satu bagan yang menggambarkan proses transisi tersebut. Skala waktu yang berjalan telah mengubah Kauman dari kota tua yang tradisional dan religius menjadi bagian dari sistem yang baru yaitu modernisasi, tentunya dengan berbagai indikator yang ada.

Dari situ kajian tentang perubahan sosial di masyarakat Kauman ini ingin melihat proses perubahan tersebut. Dimana masa-masa transisi Kauman untuk melakukan berbagai adaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut, mampu menjelaskan kepada kita tentang arti perubahan, arah perubahan dan mekanisme perubahan. Oleh karena itu kajian terhadap perubahan sosial ini, peneliti merumuskannya dalam pertanyaan :

1. Meliputi apa saja, Kauman telah mengalami perubahan (dengan karakteristiknya yang lama) ?
2. Bagaimana pola perubahan yang terjadi di Kauman ?
3. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab dari perubahan yang ada di Kauman ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Usaha untuk melakukan studi perubahan sosial pada penelitian ini, diharapkan mampu menghasilkan :

1. Suatu gambaran tentang sebuah sistem sosial budaya yang mengalami bentuk-bentuk kemundurannya untuk kemudian digantikan dengan sistem budaya yang lain.
2. Suatu penjelasan tentang proses dan pola perubahan dalam suatu masyarakat dengan berbagai implikasi yang menyertai perubahan tersebut.
3. Suatu penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan perubahan itu terjadi.
4. Sebuah relevansi antara teori-teori yang menjelaskan perubahan sosial dengan karakter masyarakat yang mempunyai bingkai kebudayaan yang khas.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa :

1. Secara teoritik, mampu memberi pemahaman akan studi perubahan sosial terutama untuk masyarakat dengan karakter yang khas
2. Pembuktian secara teoritik dan metodologis berbagai teori perubahan yang dibangun di atas konstruk masyarakat yang berbeda dengan masyarakat Jawa.
3. Secara langsung penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk melihat masyarakat dalam karakter sesungguhnya dimana perubahan adalah hal yang mutlak namun seiring kebijakan yang ada dan yang akan ada, agar tetap memperhatikan berbagai aspek yang ada dalam masyarakat.

## **E. KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka dalam studi perubahan sosial sebenarnya berangkat dari sebuah asumsi dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dinamis. Dimanis dalam artian yang luas, dimana manusia mempunyai piranti untuk mendinamisir dirinya, yang juga dibekali kemampuan untuk beradaptasi atau kemampuan untuk merubah segala sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.

Dari realitas tersebut, berbagai perspektif telah muncul dalam tradisi pemikiran sosiologi. Dengan menempatkan perubahan sebagai sesuatu yang selalu melekat didalam manusia sebagai salah satu aspek dalam kehidupan sosialnya, dengan kata lain perubahan adalah normal dan berkelanjutan. Apapun level analisis yang akan kita gunakan baik pada tingkat individual ataupun pada tingkat kolektivitas. Dalam bahasa lain, sekalipun masyarakat selalu mengusahakan sebuah stabilitas dalam sistem sosialnya (entah dalam nilai, kepercayaan ataupun konsensus) namun jelas bahwa masyarakat tetap mempunyai karakter untuk berubah dan perubahan itu sendiri merupakan aspek yang kontinuitif. Hal itu selalu akan terjadi sebab akan selalu ada variabel yang mendorong perubahan tersebut.

Beberapa hal dalam kajian tentang perubahan masih menjadi diskursus dikemukakan oleh Robert H Lauer, ada pada beberapa ruang teoritis diskursus perubahan yaitu mengenai arti perubahan itu sendiri, arah perubahan, mekanisme perubahan dan beberapa asumsi dasar tentang karakter dasar sifat dari manusia. Namun, tidak tertinggal, Laurer juga menampakkan beberapa kecendrungan yang paling akhir dari kajian tentang perubahan sosial.

Mengenai diskursus arti dari perubahan sosial, ada garis merah yang mendasari dan menjadi kesamaan dari berbagai teori tersebut dimana konsepsi perubahan sosial lebih mengacu pada perubahan yang dialami oleh masyarakat diberbagai tingkat, mulai dari individu hingga tingkat kolektivitas, dari nilai-nilai sosial hingga moralitas tertinggi yaitu agama. Para pemikir dari aliran *fungsiional-struktural* yang memberikan penekanan pada perubahan yang ada pada ruang-ruang struktur masyarakat karena menurut mereka struktur itu sendiri cenderung stabil dan setiap perubahan pada ruang ini berarti telah terjadi proses yang luar biasa dengan penyebab yang sama-sama mempunyai kekuatan besar untuk melakukan perubahan. Sehingga perubahan yang terjadi akan tergambarkan dalam perubahan yang dialami oleh nilai-nilai dasar yang sebelumnya mampu menyatukan masyarakat tersebut. Berbeda dengan teoritisi struktural, aliran *developmentalis* malah mengartikan perubahan sebagai arah pergerakan masyarakat menurut suatu garis perkembangan tertentu. Dimana terjadinya perubahan sebagai akibat dari perubahan sifat kehidupan masyarakat itu sendiri. Disini perbedaan ruang-ruang perubahan pada masyarakat, juga menjadi kajian tersendiri, dimana Spencer melihat perubahan masyarakat ada pada proses evolusinya, Durkheim melihat pada bentuk-bentuk solidaritas, Comte pada pola pikir masyarakat atau Marx yang deterministik melihat pada perubahan alat-alat produksi dan kepemilikannya. Tetapi yang jelas berbagai perubahan itu terjadi menurut suatu pola tertentu, tidak serampangan tanpa pola. Namun berbeda lagi ketika kita juga melibatkan para teoritisi yang melihat perubahan masyarakat pada aspek *psikologi-sosial* yang melihat berbagai jenis perubahan khusus yang diakibatkan oleh proses modernisasi sebagai implikasi dari agenda pembangunan ekonomi pada negara maju hingga yang masih berkembang. Mereka memusatkan perhatiannya pada peranan

individu dalam masyarakat yang sedang memodernisasi diri. Dan yang tidak dapat kita tinggalkan adalah pendefinisian perubahan oleh pemikir klasik yang menggunakan perspektif *historis* (siklus) mereka, dalam melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai perubahan pada bentuk peradaban masyarakat itu sendiri.

Persoalan tentang arah perubahan juga terjadi fragmentasi, dimana orang-orang historian menegaskan bahwa -dalam pengertian mereka- perubahan mempunyai arah yang jelas, yang dimulai dari lahirnya peradaban kemudian berkembang dan hancur dengan sendirinya. Berbeda dengan perspektif tersebut, orang Parsons-nian sebagai wakil dari aliran fungsionalisme hanya mengajukan proposal pada masyarakat yang sedang berkembang untuk meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakatnya dalam melalui berbagai proses perubahan tanpa membuat penjelasan tentang arah perubahan itu sendiri. Sedang modernisasi hanya mengarahkan masyarakat pada proses pengadopsian karakter masyarakat Barat dengan berbagai bentuk sisi kehidupannya, disini orang-orang yang menggunakan analisis psikologi sosial melihat kemandekan suatu masyarakat menyebabkan proses pengadopsian tersebut. Tidak ada suatu penggambaran tentang tingkat-tingkat masyarakat seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang *developmentalis*, ketika mereka membuat penjelasan tentang awal dan akhir dari perubahan masyarakat.

Perdebatan tentang mekanisme perubahan juga menjadi bagian yang penting dan tidak dapat kita abaikan ketika menginginkan penjelasan dan relevansi berbagai teori tersebut. Karena penggambaran terhadap proses perubahan dengan berbagai alatnya akan mampu menempatkan kita pada pilihan-pilihan yang tegas antara pemikiran historis yang menempatkan berbagai variabel sebagai proses perubahan seperti tantangan dan

tanggapan individu, sistem sosio-kultural yang berubah sebagai akibat dari perubahan berbagai aktivitas individu-individu di dalamnya (yang hampir sama dengan pemikiran developmentalisme) atau mekanisme yang ditawarkan oleh pemikir psikologi sosial yang mengemukakan berbagai keadaan internal individu yang didorong oleh fakta internal seperti kegelisahan, kebutuhan untuk berprestasi hingga berbagai stimulan yang diberikan oleh proses perkembangan institusi perekonomian dengan teoritis fungsionalis (terutama Parsons) yang memang tidak memberi ketegasan tentang mekanisme perubahan sosial yang terjadi namun mengemukakan berbagai penyebab internal dan eksternal perubahan sosial.

Namun semua perdebatan itu, tetap mempunyai benang merah antara satu dengan lainnya, dimana mereka menggunakan asumsi dasar yang sama. Bahwa prosesi perubahan itu mempunyai sifat melebar selama perubahan itu mempunyai penolakan yang minim sehingga perubahan akan selalu memperbesar makna perubahan itu sendiri takkala mampu memberi manfaat. Disamping asumsi lain yaitu perubahan tingkat kebutuhan manusia yang mampu menjadikan perubahan bersifat normal. Dari kondisi seperti itu, para teoritis melihat bahwa arah perubahan dapat ditentukan, sejauh masih ada kerangka nilai yang tetap membingkai perubahan tersebut. Kerangka nilai itu akan melakukan kontrol terhadap perubahan dan apabila terjadi perubahan yang mampu merubah kerangka nilai (yang lama) maka otomatis hasil dari perubahan tersebut adalah kerangka nilai yang baru, yang juga akan kembali menjadi bingkai dari perubahan yang ada dan begitu seterusnya perubahan terkonstruksi dengan sendirinya. Semua itu tetap bisa berproses sebab manusia memang mempunyai sifat dasar sebagai makhluk sosial yang mempunyai kemampuan dan kecendrungan untuk hidup bermasyarakat.

Mengenai beberapa kecenderungan terakhir tentang kajian perubahan sosial, Laurer memberikan beberapa alternatif untuk mengkaji tema yang sama namun mempunyai pendekatan yang berbeda dengan berbagai pendekatan yang telah digunakan oleh beberapa teori sebelumnya yaitu pendekatan dengan menggunakan teori Konflik dari Ralf Dahrendorf, teori evolusi dengan tokohnya Gerhard Lenski atau teori Sistem Umum yang di gagas oleh Amitai Etzioni dalam eksemplarnya *The Active Society* (*Ibid*, 1985 : 154-188).

#### **a. Perubahan Sosial**

##### **1. Deskripsi Perubahan**

Astrid Susanto memberi deskripsi tentang perubahan masyarakat pada abad 20-an lebih dikarenakan oleh kemajuan teknologi, yang mana kemajuan itu merupakan kemajuan juga dalam dimensi ilmu pengetahuan manusia. Penegasannya bahwa kemajuan teknologi tidak saja hasil dari modifikasi dari suatu ilmu pengetahuan namun lebih jauh dari itu telah mampu mengubah manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Dimana salah satu perubahan itu adalah perubahan pada tataran norma dan berbagai proses pembentukan norma-norma baru, yang merupakan inti dari usaha manusia dalam mempertahankan statusnya sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok dengan manusia yang lain. Prosesi perubahan ini mau tidak mau menjadi proses disintegrasi dalam banyak bidang, sehingga akan selalu ada usaha untuk mengembalikan tatanan yang telah berubah sebelumnya menjadi sebuah tatanan baru, yang lebih relevan dengan berbagai kebutuhan masyarakat yang ter-baru juga. Namun ada kalanya tidak semua perubahan (yang sifatnya multi kompleks) akan berakhir dalam kondisi seperti apa yang diurai di atas. Sebab kemampuan manusia untuk tetap menerima berbagai bentuk perubahan yang

menimpanya, juga berbeda. Bisa saja setelah perubahan terkonstruksi nilai-nilai baru namun tidak menutup kemungkinan akan ada individu-individu yang tenggelam dalam arus perubahan tanpa mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan tersebut (1999 : 157-162).

## **2. Definisi Perubahan**

Perubahan itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan perubahan itu sendiri bisa berupa kemunduran dan bisa juga berupa kemajuan. Sedangkan masyarakat (salah satunya) didefinisikan sebagai wadah dimana individu-individu didalamnya saling berhubungan dengan dengan hukum dan budaya tertentu untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Sehingga perubahan dalam kerangka masyarakat secara umum menyangkut perubahan pada elemen-elemen yang terdapat didalam masyarakat, baik itu pada sistem nilai, struktur ataupun sistem perilakunya (Abdul Syani, 1995 : 83). Atau dalam bahasa lain, proses perubahan masyarakat pada dasarnya merupakan perubahan pola perilaku kehidupan dari seluruh norma-norma sosial yang lama menjadi pola perilaku dan seluruh norma sosial yang baru secara seimbang, berkemajuan dan berkesinambungan. Konsekuensinya kemudian adalah pola-pola kehidupan masyarakat lama yang dianggap sudah usang diganti dengan pola-pola kehidupan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang paling kontemporer.

Hampir sama dengan pendapat tersebut, dalam *Dictionary of Sociology* membuat definisi perubahan sebagai variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, bentuk-bentuk sosial serta setiap modifikasi pola antara hubungan yang mapan dan mempunyai standart perilaku. Sedangkan Robert H Laurer, lebih memberi penjelasan

terhadap fragmen perubahan sosial pada berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individual hingga kolektivitas individu. Berbagai tingkat perubahan yang mewakili kawasan analisis dan satuan analisis yang mewakili setiap tingkat perubahan. Sehingga perubahan sosial akan dapat dipahami pada dimensi yang berbeda karena perubahan sosial hanya dapat dipelajari pada satu tingkat tertentu atau lebih dengan menggunakan berbagai kawasan studi dan berbagai satuan analisis. Oleh Laurer, digambarkan tingkat analisis perubahan sosial pada masyarakat akan mewakili kawasan studi pada sistem stratifikasi, struktur, demografi dan wakil unit studinya pada pendapatan, kekuasaan, peranan hingga tingkat patologi. Dan pada individu sebagai tingkat analisis, mempunyai kawasan studi pada sikap dan wakil unit studinya pada keyakinan mengenai berbagai persoalan (Robert H Laurer, *Op. Cit.* : 3-8).

Sedangkan Hendropuspito (1989 : 255-257), merumuskan definisi perubahan sosial dalam rumusan, yang pertama, sebagai perbedaan keadaan yang berarti dalam unsur masyarakat dibanding dengan keadaan sebelumnya. Dan rumusan yang kedua, sebagai proses perkembangan unsur sosio-budaya masyarakat dari waktu ke waktu yang membawa perbedaan yang berarti dalam struktur dan fungsi masyarakat. Kedua definisi itu, dibangun diatas beberapa data riset yang memaparkan akan adanya perubahan yang berbeda pada tiap unsur budaya, titik tolak tujuan dan kontinum waktu yang diambil dari titik memulai sampai titik tujuan.

Dan setiap perubahan sosial yang ditempatkan sebagai realitas sosial mau tidak mau akan menyentuh tiga aspek unsur dasar yaitu manusia, waktu dan tempat. Dengan kata lain, setiap perubahan yang berarti akan digerakkan oleh manusia, dalam unit waktu tertentu

dan lingkungan tertentu, maka konsekuensinya adalah setiap kajian perubahan tidak bisa mengabaikan semua aspek itu.

### **3. Proses Perubahan**

Kemudian bagaimana proses perubahan tersebut berjalan dalam masyarakat ? Padahal masyarakat dan perubahan adalah dua hal yang berbeda namun sering kali berada pada satu kebersamaan. Alvin L. Berthoin menyatakan bahwa awal dari proses perubahan adalah proses difusi karena hal ini akan terkait dengan penyebaran gagasan, ide-ide dan keyakinan maupun hasil-hasil budaya yang berupa fisik. Disinilah letak perubahan berproses, dimana difusi dimaknai sebagai suatu proses yang menyebarkan ciri khas suatu kebudayaan. Entah itu hasil dari suatu perubahan ataupun menjadi awal dari perubahan. Dan proses penyebaran berbagai perubahan itu dipengaruhi oleh banyak hal. Rogers dan Shoemaker menyatakan beberapa hal penting yang terkait dengan proses tersebut, antara lain :

- Inovasi yaitu suatu ide baru, tidak pandang apakah itu merupakan hasil ciptaan yang dihasilkan belum lama atau yang dihasilkan sebelum itu.
- Komunikasi yaitu interaksi yang berlangsung sewaktu orang yang satu mengkomunikasikan dan melontarkan suatu ide baru kepada yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Sistem sosial dimana individu-individu bertindak dalam kaitannya dengan inovasi tertentu.
- Unsur waktu : berkaitan kemampuan orang untuk menerima inovasi baru dengan mudah, memiliki ciri-ciri berlainan dengan orang-orang yang membutuhkan waktu yang lama untuk menerima inovasi tersebut (>>>).

Dari beberapa gambaran diatas, kita ambil kesimpulan sederhana bahwa perubahan didalam masyarakat tidak selalu berjalan dengan lancar, oleh karena hambatan-hambatan tertentu. Ataupun kekuatan-kekuatan yang tetap bersumber dari dalam masyarakat. Namun setiap perubahan, juga akan terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap ide perubahan itu sendiri. Dimana individu-individu mengalami proses penerimaan yang berupa tahap-tahap tertentu yaitu kesadaran, dimana seseorang mengetahui adanya inovasi dan memperoleh beberapa pemahaman tentang bagaimana inovasi itu berfungsi. Lalu, persuasi yaitu tahap dimana seseorang berkenan atau tidak dengan inovasi tersebut, yang kemudian diikuti oleh keputusan dari seseorang yang terlibat dalam kegiatan yang membawanya pada pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi hingga pada akhirnya individu harus mengkonfirmasi dengan berbagai rasionalisasi keputusannya tersebut.

#### **4. Faktor-faktor Penyebab Perubahan**

Namun proses penerimaan tersebut, tidak bisa dilepaskan begitu saja dari berbagai variabel yang ada dalam masyarakat. Karena akan ada berbagai kondisi yang terdapat didalam masyarakat dan memberi respon yang berbeda-beda terhadap ide perubahan itu. Ada bagian masyarakat yang menentang setiap ide perubahan, menentang tipe-tipe perubahan tertentu saja atau sudah puas dengan keadaan yang ada sambil beranggapan bahwa sumber perubahan tersebut tak tepat hingga masyarakat yang melihat tidak adanya sumber daya dalam masyarakat untuk melakukan perubahan yang diinginkan (Soleman b Taneko, 1990 : 147).

Berbagai kondisi tersebut disebabkan oleh adanya kekuatan yang bersaing didalam masyarakat dan sudah mapan kondisinya, kekompleks-an perubahan itu sendiri sehingga

perubahan akan sulit dimaknai oleh masyarakat secara luas. Dan bisa juga berupa faktor-faktor seperti rasa takut terhadap akan terjadinya kegoyahan pada integritas kebudayaan yang ada, terutama individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Yang sudah mempunyai investasi sosial yang tinggi, entah berupa status, penghargaan atau nilai-nilai yang meletakkannya pada posisi terhormat. Sehingga prasangka yang buruk terhadap hal-hal yang baru menjadi relevan karena berbagai bentuk kepentingan tersebut.

Kemudian, penting juga ditambahkan bahwa setiap perubahan dalam masyarakat tentu mempunyai penyebab. Dimana penyebab tersebut menjadi daya gerak dari proses perubahan dalam suatu masyarakat yang datang dari dua sumber -dari dalam dan dari luar-, demikian disampaikan oleh Raymond Firth. Yang menjadi stimulus dari dalam adalah daya gerak yang berwujud gagasan, ide-ide atau keyakinan-keyakinan dan hasil-hasil budaya yang berupa fisik. Dan Alvin L. Berthan berpendapat bahwa awal dari perubahan itu adalah komunikasi, maka proses dengan mana informasi disampaikan dari individu satu kepada individu yang lain. Maka yang dikomunikasikan itu tidak lain adalah gagasan, ide-ide, keyakinan maupun hasil budaya yang berupa fisik. Sedangkan stimulan yang datang dari luar, lebih dikarenakan pada perubahan didalam lingkungan pergaulan itu sendiri dan untuk sebagian lagi terletak juga dalam kekuatan melakukan ekspansi terhadap peradaban lain.

Sedangkan Margono Slamet, dalam konsepsinya tentang macam kekuatan yang mempengaruhi perubahan, menyatakan terdapat tiga macam kekuatan yang mempengaruhi perubahan, antara lain adalah kekuatan pendorong (*motivational forces*), kekuatan mana yang terdapat dalam masyarakat dan bersifat mendorong orang-orang untuk berubah. Hal ini dinilai sebagai kondisi atau keadaan yang penting sekali, oleh

karena itu tanpa adanya kekuatan tersebut orang akan mempunyai keengganan untuk berubah. Kekuatan itu berasal dari segala aspek situasi yang merangsang kemauan untuk melakukan perubahan dan kekuatan tersebut bersumber dari :

- Ketidak puasan terhadap situasi yang ada, karena itu ada keinginan untuk mendapatkan situasi yang lain.
- Adanya pengetahuan tentang perbedaan antara yang ada dan yang seharusnya bisa ada.
- Adanya tekanan dari luar seperti kompetisi atau keharusan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar.
- Kebutuhan dari dalam masyarakat untuk mencapai efisiensi dan peningkatan, misalnya produktivitas (Soleman b Taneko, *Ibid* : 135-138).

Artinya faktor pendorong perubahan dalam masyarakat bisa ada dan didatangkan ataupun perubahan itu merupakan keniscayaan di dalam masyarakat. Pada kondisi yang terakhir, biasanya berangkat dari situasi dalam masyarakat sendiri yang menghasilkan ketidakpuasan terhadap keadaan yang sekarang, yang disebabkan oleh nilai-nilai, norma-norma sosial, pengetahuan dan teknologi yang sekarang ada dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat atau karena dianggap tidak mampu memenuhi berbagai kepentingan yang semakin kompleks dan serba tak terbatas. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat cepat atau lambat akan berubah lewat berbagai upaya untuk mencari formulasi baru terkait dengan berbagai kebutuhan baru yang ada. Apalagi didukung dengan fakta dimana lingkungan di dalam masyarakat menemukan berbagai metode dan teknologi atau sarana baru yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. Berbagai hal yang sifatnya baru pada akhirnya

menjadi penyebab terganggunya keseimbangan atau tidak adanya sinkronisasi. Terganggunya keseimbangan dengan sendirinya akan mengakibatkan terjadinya ketegangan dalam tubuh masyarakat.

Secara umum, ketegangan-ketegangan yang terjadi didalam tubuh masyarakat lebih dikarenakan dialektika antara penemuan baru (*invention*) dengan pertumbuhan penduduk (*population*) dan kebudayaan (*culture*). Dimana faktor penemuan baru adalah hasil gagasan baru yang merupakan rangkaian penciptaan individu-individu dalam masyarakat dengan bersandar pada tujuan dan kehendak tertentu. Sedangkan penemuan-penemuan baru merupakan hasil ciptaan dari sebuah proses sebelumnya yaitu penemuan dari suatu unsur yang baru, yang diciptakan oleh individu-individu dalam masyarakat (*discovery*). Dalam hal ini, bisa dalam bentuk apapun temuan tersebut. Entah dalam bentuk immaterial semisal pola ekonomi baru, nilai-nilai keseharian yang dihasilkan dari sebuah proses interaksi dengan budaya lain atau karakter-karakter budaya yang berbeda dengan karakter budaya pada waktu sebelum terjadi perubahan atau bentuk-bentuk material yang termanifestasikan dalam bentuk-bentuk kebendaan, yang akan terkait dengan nilai gunanya dalam kehidupan dalam masyarakat. Dan beberapa faktor pendorong terhadap individu dalam usaha mencari penemuan baru yaitu :

- Kesadaran dari orang perorangan akan kekurangan dalam kebudayaannya.
- Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan.
- Adanya perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

Sedangkan perubahan masyarakat yang disebabkan oleh faktor pertumbuhan penduduk yaitu perubahan masyarakat yang disebabkan oleh pertumbuhan dan berkurangnya penduduk daerah tertentu. Pertumbuhan penduduk tersebut bisa disebabkan oleh adanya

faktor-faktor yang membuat suatu wilayah mempunyai daya tarik baik secara ekonomis ataupun secara geografis dan itu akan berdampak pada masuknya individu-individu ke dalam suatu lingkup masyarakat yang telah mempunyai suatu karakter kebudayaan tertentu. Konsekuensinya adalah adanya proses tarik ulur antar karakter kebudayaan pada individu-individu dalam suatu masyarakat akan berdampak pada semakin kompleksnya masyarakat tersebut dengan berbagai latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda dan itu berarti akan merubah masyarakat pada perilaku dan pola hubungan sosial yang semakin individualis. Atau tarik ulur tersebut akan berdampak pada berkembangnya wilayah pendapatan pada struktur ekonomi baik itu ruang lingkup kerja, standart hidup hingga terseleksi individu-individu ke dalam tingkatan-tingkatan kerja sesuai dengan kapasitas mereka. Dan perubahan itu pada akhirnya akan mampu meluas ke berbagai fragmen didalam masyarakat, entah kaitannya dengan fragmen hukum, sosial ataupun politik. Selain perubahan yang diakibatkan oleh pertumbuhan masyarakat, faktor kebudayaan pada masyarakat secara timbal balik akan dapat mendorong perubahan pada bentuk dan hubungan sosial- kemasyarakatannya. Dimana karakter kebudayaan yang beraneka ragam akan saling berusaha untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Kecendrungan untuk saling mempengaruhi dan saling terbuka atau sebaliknya saling menolak.

### **5. Tipe-tipe Perubahan**

Yang terakhir, berkaitan dengan kajian tentang perubahan sosial adalah tipe-tipe perubahan. Namun penting untuk diketahui dan ditekankan bahwa studi mengenai perubahan fungsi sosial dalam satuan sosio-budaya yang dihayati suatu satuan sosial atau masyarakat, tidak bisa mengabaikan kenyataan tentang perubahan pada dimensi struktur

masyarakat yang bersangkutan karena masyarakat menjalankan fungsinya selalu dalam struktur yang dibuatnya atau dalam struktur yang sudah ada. Sekalipun struktur sosial memiliki aspek yang statis, hendaknya struktur itu tidak digambarkan sebagai sesuatu yang kaku. Struktur sosial merupakan suatu komposisi dari semua unsur kemasyarakatan yang dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga seluruh unsur dapat menjalankan fungsi yang telah ditentukan dan menghasilkan jasa yang diinginkan. Unsur-unsur tersebut adalah sistem penempatan warga masyarakat menurut status sosial dan peranannya yang sesuai, pola-pola kelakuan sosial, sistem nilai budaya yang menuntut jenjang hirarki nilai yang berlaku bagi satuan budaya itu. Namun pada dasarnya berbagai tuntutan tersebut akan diusahakan untuk selalu berjalan relatif tetap dan berbagai perubahan yang menimpa berbagai unsur yang ada di dalam struktur atau perubahan yang menimpa struktur itu sendiri merupakan konsekuensi logis takkala asumsi dasar kita adalah adanya individu-individu yang dinamis, yang dibingkai dalam masyarakat. Berbagai perubahan itu biasanya meliputi, perubahan struktural dimana perubahan ini meliputi bergesernya cara pandang individu terhadap struktur yang ada di dalam masyarakatnya atau memang menurunnya kemampuan struktur untuk mempertahankan berbagai nilai gunanya pada masa silam karena harus dihadapkan pada dinamika tuntutan dan dinamika masyarakat. Kemudian yang kedua, perubahan pada pola-pola kelakuan. Ketika struktur mengalami pergeseran maka berbagai bentuk aktivitas yang menyertainya-pun mengalami perubahan yang sesuai dengan berbagai kelakuan yang baru dan relevan dengan perubahan yang terjadi. Lalu perubahan itu juga akan menimpa nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Struktur, pola kelakuan dan nilai adalah unsur yang mutlak ada dalam bingkai suatu masyarakat. Dan dinamika yang dialami oleh nilai-nilai sosial juga akan menghasilkan pola

kelakuan yang berbeda dan pada akhirnya dinamika itu akan mampu mendinamisir struktur yang ada, selama struktur itu tidak mampu mengadopsi berbagai hal yang dinamis itu (Hendropuspito, *Op. Cit.* : 257-262).

Lain dengan paparan di atas, Astrid Susanto melihat jenis perubahan sosial dalam tiga tampilan, yang berupa evolusi sosial, mobilitas sosial dan revolusi sosial. Yang pertama, yaitu evolusi sosial merupakan perkembangan gradual karena adanya kerjasama harmonis antar manusia dengan lingkungannya, dalam bentuk evolusi kosmis, evolusi organis dan evolusi mental, dimana yang terakhir ini merupakan akibat dari adanya perubahan teknologi (*technical change*) dan perubahan kebudayaan (*cultural change*). Masing-masing perubahan mempunyai kecepatannya masing-masing karena adanya interdependensi dan relasi antara bagian-bagian yang berubah dengan yang tidak berubah. Maka yang akan terjadi kemudian adalah kemampuan masing-masing kelompok apabila terjadi perubahan yang sama cepatnya. Artinya, kita akan menyinggung kemampuan masyarakat dalam mengelaborasi perubahan tersebut dalam sistemnya (*adaptif*) atau kemudian melakukan penolakan terhadap perubahan yang sedang berjalan (*non adaptif*) dan kemampuan untuk mengadaptasi perubahan tersebut tergantung pada elemen-elemen tertentu, yang terdapat di dalam masyarakat. Oleh Bogardus ditegaskan bahwa kemampuan tersebut dicapai melalui :

1. Perubahan dari teknologi yang ada dan punya nilai guna dalam masyarakat.
2. Pengisian waktu luang yang dilakukan oleh individu-individu.
3. Derajat pendidikan yang diperoleh anggota-anggota masyarakat.
4. Aktivitas dalam masyarakat.
5. Suasana rumah tangga.
6. Agama.

Kemudian yang kedua, mobilitas sosial yang didefinisikan sebagai penyesuaian diri dengan keadaan karena adanya dorongan oleh keinginan manusia akan hidup dalam keadaan yang lebih baik, serta pemanfaatan dari penemuan-penemuan baru dan pada umumnya gerakan sosial terbentuk apabila ada konsep yang jelas apalagi apabila konsep itu tidak mempunyai strategi yang jelas pula. Hal itu akan sangat terasa pada prosesi mobilitas yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan membawa implikasi pada perubahan kepribadian ditingkat individu yang terlalu parah, ketidakstabilan dalam masyarakat, adanya lebih banyak rangsangan dari pada perubahan yang nyata dan itu lebih disebabkan oleh perubahan yang hanya menjadi slogan atau rangsangan yang tidak diwujudkan. Dan mobilitas sendiri, banyak terjadi bila hambatan-hambatan dalam perkembangan atau apabila evolusi mengalami kegagalan. Hal mana yang disebabkan oleh tindakan-tindakan dalam bidang autokrasi, adanya terlalu banyak kepentingan kelompok/individu, adanya kelompok-kelompok yang hendak mempertahankan status ekonomi atau politiknya.

Lalu revolusi yang senantiasa ditandai dengan adanya teror atau aktivitas fisik, yang tentunya didahului oleh ketidakpuasan dari golongan-golongan tertentu, yang mana hal itu terjadi setelah didahului oleh tersebarnya ide-ide baru dalam masyarakat. Dilihat dari segi sosialnya, suatu revolusi pecah apabila dalam suatu masyarakat faktor disorganisasi lebih besar daripada faktor reorganisasi atau apabila faktor-faktor adaptif lebih kecil daripada faktor nonadaptif. Dan biasanya revolusi sosial terjadi apabila terdapat suatu kegagalan dalam proses evolusi, dimana tahapan puncak revolusi selalu berangkat dari adanya kebutuhan akan harapan-harapan yang berubah namun dirasakan tidak mungkin untuk diwujudkan. Namun sebelum revolusi terjadi, akan terdapat beberapa gejala yang dipakai indikator untuk melihat kemungkinan terjadinya revolusi. Indikator tersebut antara lain,

berupa frustrasi sosial, peningkatan aktivitas politik (praktis) dan terjadinya instabilitas politik. Frustrasi sosial sendiri terjadi apabila dinamika ekonomi sekaligus tidak berarti mobilitas sosial atau bahkan bila harapan akan terjadinya mobilitas sosial lebih tinggi dari pada hasil pembangunan ekonomi. Selanjutnya terjadi fase peningkatan praktek politik sebagai wujud aktualisasi keinginan untuk memperbesar ruang-ruang mobilitas sosial yang telah tertutup dan pada akhirnya akan terjadi partisipasi politik praktis yang tak terkendali dimana hal ini terjadi lebih karena dikonstruksi oleh ketiadaan upaya-upaya untuk melembagakan kegiatan-kegiatan politik tersebut (Astrid Susanto, *Op. Cit.* : 170-177).

## **b. Studi Transisi Masyarakat**

Layaknya siklus, peradaban manusiapun mengalami hal yang sama. Karakter kebudayaan yang sedang terbangun bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya secara otomatis. Namun, karakter kebudayaan selalu mempunyai relasi dengan karakter kebudayaan yang lain, bisa dengan budaya yang sebelumnya ada ataupun sebagai sebuah hasil dari interaksi dengan budaya yang lain.

### **1. Studi Perubahan Dalam Budaya**

Masyarakat dalam kajian sosiologi mendapat porsi yang besar karena dalam masyarakatlah individu-individu bersama-sama menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Dan didalam masyarakat kebudayaan akan dikonstruksi secara terus menerus, dengan tetap mencari relevansinya dengan berbagai kebutuhan yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Gambaran tentang arti pentingnya kebudayaan dalam masyarakat ditegaskan oleh Melville

J. Herkovits dan Bronislaw Malinowski yang merumuskan pengertian '*cultural determinism*', yang berarti bahwa segala sesuatu yang terdapat didalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dan perlu diketahui bahwa pemaknaan terhadap kebudayaan juga penuh dengan berbagai bentuk sehingga sukar untuk mendapatkan pembatasan akan pengertian atau definisi yang tegas tentang kebudayaan. Sedangkan oleh E. B. Taylor kebudayaan dianggap sebagai kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kebiasaan yang didapatkan oleh individu sebagai anggota masyarakat. Artinya, kebudayaan mencakup keseluruhan dari apa-apa yang didapatkan dan dipelajari oleh individu dalam masyarakat.

Kebudayaan itu sendiri pada dasarnya sama, karena diletakkan diatas unsur-unsur pokok dari kebudayaan yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga dan sistem politik. Malinowski bahkan menambahkan unsur-unsur pokok dalam setiap keadaan, yang berupa tatanan :

- Sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat agar masyarakat menguasai alam sekelilingnya.
- Organisasi ekonomi.
- Alat-alat dan lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan, dimana lembaga keluarga menjadi salah satu yang utama.
- Organisasi kekuasaan.

Sedangkan Kluckhohn menambahi konsepsi kebudayaan dengan mengajukan kajian tentang *Universal Categories of Culture* sebagai unsur kebudayaan yang mutlak ada

pada setiap bingkai kebudayaan masyarakat. Tujuh unsur kebudayaan yang ada dan dianggap sebagai *Cultural Universal*, yaitu :

- Peralatan dan perlengkapan hidup manusia
- Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi
- Sistem kemasyarakatan
- Bahasa
- Kesenian
- Sistem pengetahuan
- Sistem kepercayaan

Unsur-unsur tersebut akan tetap ada dan dipertahankan oleh masyarakat sejauh masing-masing unsur tersebut masih mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Sejalan unsur-unsur tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang ada dan berkembang didalam masyarakat maka unsur tersebut akan relevan dan tak tergantikan. Namun apabila kemampuan unsur-unsur tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, secara otomatis sistem yang ada dalam masyarakat akan memproduksi berbagai hal untuk sesegera mungkin memenuhi kebutuhan yang ada. Karena disitulah penjelasan akan nilai guna kebudayaan terasa bagi individu-individu yang memilikinya (Soerjono Soekanto, 1986 : 153-167). Dari penjelasan itu digambarkan bagaimana setiap masyarakat akan mempunyai identitas kebudayaannya. Disetiap sistem yang universal itu, masing-masing kebudayaan akan mempunyai bentuk yang sesuai dengan karakter masyarakat sehingga akan didapatkan sebuah kejelasan bahwa pada setiap masyarakat (pada kurun waktu tertentu) akan melahirkan berbagai bentuk kebudayaan yang berbeda-beda. Karena tiap

bingkai masyarakat akan mempunyai kerangka nilai yang berbeda, oleh sebab yang berbeda pula.

## **2. Studi Perubahan Dalam Sejarah**

Dalam perspektif historis dijelaskan bahwa pada abad 14 ketika pertama kalinya para pedagang dari India masuk ke Indonesia untuk berdagang, mereka memulainya dari daerah pesisir pantai utara. Dari situ kemudian sejarah kita berangkat untuk mengkonteks-kannya dengan kondisi ke-Islaman yang mulai merebak ke berbagai belahan wilayah di Indonesia (sejarah Indonesia modern). Kondisi yang kemudian terbangun adalah membesarnya ruang kultural religius dan juga ruang-ruang politis yang juga tercipta ketika momentum ini dimulai. Implikasi yang paling nampak adalah terintegrasinya masyarakat daerah pesisir pantai di belahan utara dengan berbagai pihak yang menjadi aktor dalam perdagangan internasional, sehingga mampu memberi basis kelembagaan pada konteks kultural masyarakat yang ada di daerah tersebut. Fenomena berdirinya kerajaan Demak pada abad 15 adalah gambaran yang maksimal tentang pola integrasinya berbagai kondisi politis, ekonomis, religius dalam sebuah wadah. Pasca keberadaan kerajaan Demak berdiri kemudian membangun kekuatan dengan mengkonsolidasi kekuataannya sehingga mampu menundukkan berbagai kota besar yang ada di beberapa daerah pesisir utara dan wilayah pedalaman di Jawa timur seperti Tuban, Madiun, Pasuruan, Malang hingga Kediri. Dengan pengembangan yang di dukung dengan keberadaan kerajaan Islam yang lain seperti Cirebon dan Banten.

Namun, kondisi itu tidak bertahan lama, terutama pada saat memasuki awal abad ke-16, saat ketika pertama kalinya kekuatan Barat memasuki Asia Tenggara. Dan kelak moment ini menjadi awal terbentuknya sejarah baru di Indonesia. Pada saat itu, ekspansi

merkantilisme Eropa dengan daya dukung kekuatan militer mampu menghancurkan keamanan sistem perdagangan yang telah mapan di Asia Tenggara untuk kemudian memasuki masa-masa kolonialisme. Hal itu terjadi ketika Demak mulai tergerogoti oleh keberadaan Portugis (di satu sisi) yang telah menghancurkan kekuatan kerajaan Malaka (yang menjadi payung bagi eksistensi Demak) secara otomatis pula mengurangi kemampuan cengkaman kerajaan Demak ke wilayah-wilayah yang telah dikuasainya. Hal ini dijadikan investasi bagi kekuatan yang telah ter-reduksi sebelumnya yaitu kekuatan Hindu-Jawa. Kekuatan *renaissans* Jawa ini, kemudian melakukan konsolidasinya di wilayah pedalaman Jawa yang cenderung jauh dari konsentrasi kerajaan Demak pada saat masih tegak. Keinginan dari kekuatan Hindu Jawa yang ingin menegakkan kembali keberadaannya di Jawa, menjadi ancaman bagi keberadaan Demak yang sudah diancam juga oleh kekuatan Portugis, yang sebelumnya telah menguasai wilayah perairan di pesisir utara. Di sinilah (akhir abad 16) Demak mengalami kemundurannya, ketika momentum historis yang menggiring kekuatan Demak (Islam) menghadapi kekuatan eksternal yaitu ekspansi kapitalisme barat dan secara internal menghadapi kekuatan internal yaitu kebangkitan kekuatan ideologi pribumi (feodalisme). Konfigurasi dua kekuatan ini kemudian menjadi latar belakang sejarah kebangsaan kita sepanjang abad ke 17 hingga 19 dan ber-efek pada perubahan karakter masyarakat, yang berawal dari etos pedagang yang mobil, kosmopolit, bercorak urban berganti menjadi mentalitas petani yang statis, localised, dan agraris. Secara sosial, proses '*peasantization*' dan '*ruralisation*' beraksek luar biasa pada kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Pasca kehancuran Demak yang diakhiri dengan kekalahan Demak oleh kekuatan Pajang, yang kemudian menegakkan kekuatannya di Jawa pedalaman dan kemudian melahirkan kekuatan baru pula di daerah

Jawa pedalaman ini, yaitu Mataram yang kelak kemudian -kekuatan Mataram ini-, mampu menjadi kekuatan baru yang ada di Jawa (Kuntowijoyo, 1998 : 22-30).

Hampir sama dengan penjelasan diatas D. H. Burger (1960 : 86-104), menggambarkan bagaimana Jawa dengan bingkai kebudayaannya dihadapkan pada tantangan akan perubahan. Dimana Jawa, pada masa-masa sebelumnya telah dihantam gelombang perubahan yang pertama yaitu Hindu, yang mampu membangun peradabannya selama hampir 500 tahun lebih sekaligus mampu memapankan strukturnya dalam masyarakat lewat otoritas kekuasaannya. Namun selepas Hindu mulai mengalami krisis, dengan ditandai oleh berbagai konflik dan kekalahan yang dialami oleh Majapahit (sebagai wakil terakhir kekuasaan Hindu dalam bentuk kekuasaan), masyarakat Jawa kemudian dihadapkan pada kedatangan Islam yang sekali lagi tidak mampu bertahan lama karena gelombang perubahan yang ketiga di Jawa mulai mendekat kepulauan Jawa, ketika Islam sedang jaya-jayanya di Jawa. Mereka adalah ekspansionisme Eropa, yang pada akhirnya mengembalikan karakter kebudayaan Jawa pada karakter perfeodalan baru (tinggalan Hindu-Jawa) yang telah dielaborasikan dengan kebudayaan Islam.

Dalam karakter kehidupan masyarakat Jawa sendiri, yang paling menonjol adalah bentuk keber-agama-an mereka. Dimana kesadaran akan nilai-nilai teologis merupakan puncak dari semua kerangka nilai yang mereka sepakati. Ditegaskan oleh P.J. Zoetmulder, bahwa konstruksi filsafat hidup orang Jawa terbentuk dari perkembangan kebudayaan Jawa yang telah dipengaruhi oleh filsafat Hindu dan Islam. Sekalipun kerangka nilai yang dibangun dalam masyarakat Jawa tradisional, kepercayaan Hindu dan ajaran tasawuf Islam namun tradisi yang paling dominan adalah nilai-nilai Islam yang telah mengalami banyak proses adaptasi dengan karakter Jawa tradisional. Hal ini terasa masuk akal, karena otoritas

tradisional yang besar dan terakhir berkuasa sebelum Mataram adalah kerajaan Islam-Jawa yaitu Demak. Fakta dari berbagai naskah klasik Jawa yang menggambarkan konsepsi masyarakat tentang bangunan kehidupannya, entah dalam bentuk karya-karya sastra seperti *Serat Centini* yang menggambarkan riwayat hidup ulama yang merupakan keturunan wali atau *Serat Sasangka Djati* yang mengajarkan tentang delapan sikap dasar yang mesti dimiliki oleh setiap individu dan diawali dari nilai-nilai teologis. Atau penokohan wayang seperti halnya *Wrekudara Kalenggahan Sang Hyang Tunggal*, yang menceritakan konsepsi tasawuf keislaman lewat media-media peninggalan Hindu-Jawa (Budiono Herusatoto, 2000 : 61-86). Dan penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh masyarakat Jawa (setidaknya pada abad 16) berpusat pada persoalan yang berhubungan dengan teologi, ritual dan hubungan politik antara bentuk-bentuk mistik dan kesalehan Islam yang normatif dilapangan kehidupan sehari-hari. Proses inipun memunculkan banyak variasi dalam tipe-tipe Islam lokal Jawa (Mark Woodward, 1999 : 79-88).

Tapi oleh Woodward ditegaskan tentang proses transisi dan konversi penduduk Jawa ke Islam lebih bersifat gradual, tak merata dan berlangsung terus menerus hingga kini. Karena fakta bahwa Islam, datang ke Jawa bermula dari proses berdagang di lautan India. Dari situ potret sejarah Islam-Jawa bukan hanya proses konversi budaya saja namun penegasan Islam (pada akhirnya) sebagai agama kerajaan merupakan suatu proses tersendiri, yang banyak mengakibatkan hancurnya budaya Hindu-Budha. Dan terbentuklah konstruksi baru, dimana ulama mensubordinasi kekuasaan dan keraton. Dalam perkembangannya masyarakat Jawa kemudian sangat berorientasi pada ulama dalam pengertian status sosial yang tinggi, karena sebagian besar mereka berasal dari proses afiliasi dengan keturunan guru-guru muslim. Bahkan ulama pada masa sebelum

bangkitnya Mataram, yaitu di Demak, mereka mempunyai otoritas yang tinggi. Para ulama ada pada posisi untuk mengangkat raja-raja di kerajaan Islam di Jawa sampai pada menentukan garis besar pemerintah dan di zaman Mataram-pun tidak jauh berbeda, peran para ulama tersebut (A. Adaby Darban, 1991 : 343-350). Dan di jelaskan juga tentang arti dan peran ulama dalam masyarakat Jawa, yang terbagi menjadi ulama yang merangkap penguasa, ulama keturunan bangsawan, ulama yang menjadi alat birokrasi (abdi dalem pametakan, abdi dalem kaji dll) dan golongan ulama yang tinggal di pedesaan. Namun, ikatan keagamaan, keilmuan dan pertalian darah pada akhirnya menyuburkan perkembangan Islam di Jawa sekaligus merupakan bagian dari usaha mereka untuk tetap mempertahankan status sosial mereka dengan segala keistimewaan yang menyertainya. Jadi bentuk nilai-nilai yang dijadikan standart untuk hukum yang mengatur semua aktivitas sosial hingga budaya, ditetapkan oleh bangsawan (sebagai pewaris Hindu-Jawa) disandarkan pada para ulama (Zaini Muhtaram, 1998 : 24), bahkan relasi dan bentuk sinkreteisme Islam di Jawa sampai pada upaya pemitosan yang menempatkan Islam dan Hindu di Jawa pada konstruksi yang saling kait mengkait (Heddy Sri Ahimsa, 2000 : 349-386).

Selepas abad pertengahan (pasca Islam di Jawa) sebenarnya hampir seluruh Asia juga mengalami pergeseran kebudayaan, dimana mereka sebelumnya berada di bawah otoritas kekuasaan feodal dari Turki ke peradaban baru yang dikembangkan oleh merkantilisme Eropa. Dan dalam masa itu Jawa pun mulai kehilangan orientasi perekonomiannya di laut dan bergeser kembali ke daratan. Kemunduran perdagangan laut di Asia mengakibatkan juga melemahnya peradaban kota dan peradaban pantai yang individualis dan menyebabkan berkembangnya peradaban feodal yang kontinental. Semua perdagangan

yang pernah ada di laut lenyap dan Jawa mulai memasuki kebudayaan yang tertutup dan memisahkan diri (*isolement*) yang ekstrim. Pemisahan ini menjadi lahan subur bagi perkembangan feodalisme baru (Hindu-Jawa-Islam) yang aristokratis. Kebudayaan yang berat sebelah ini hanya berdasarkan pada berbagai tradisi kebangsawanan yang senantiasa berkembang namun tidak diiringi dengan tradisi ekonomi yang sebelumnya ada, sebagai akibat pengaruh dari luar lewat berbagai pola interaksi dengan perdagangan laut sebagai pintu gerbangnya.

Kebudayaan Jawa pada saat itu merupakan 'kebudayaan pahlawan' yang berarti bahwa setiap cita-cita hidup pada masa itu terdiri dari cita-cita atau nilai hidup kemuliaan kaum bangsawan. Atau dengan penjelasan lain dari kebudayaan ini adalah kebudayaan yang menjunjung tinggi bentuk hidup kaum bangsawan. Cara hidup ini berakar dari kekayaan kebudayaan, yang terkandung dalam kesusasteraan klasik dan wayang, yang merupakan warisan kebudayaan Jawa kuno yang dipengaruhi oleh Hindu dan Islam. Pengetahuan akan kesusasteraan Jawa dan wayang merupakan hal yang penting karena dari situlah media sosialisasi nilai sekaligus proses edukasi diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam sastra dan wayang, nilai-nilai hidup lama ditransformasikan kepada segenap masyarakat untuk dijadikan pegangan hidup, pandangan dunia dan pandangan untuk hidup, karena nilai-nilai yang ada bertujuan untuk membentuk sifat dan peradaban baru agar terbangun kepribadian-kepribadian yang sempurna. Seluruh kebudayaan yang terkandung dalam sastra dan wayang di Jawa, digunakan masyarakat agar mampu mengkonstruksi keharmonisan dalam hubungannya dengan sesama dan alam sekitarnya.

Sebenarnya zaman feodal yang tulen telah tumbang sejak abad 13 seiring dengan perkembangan periode Raja-Kota, dimana kekuasaan dibangun diatas kekayaan dalam

bentuk materi atau berupa tindakan-tindakan yang mampu menunjukkan eksistensi diri sebagai seseorang yang memegang otoritas tinggi dalam masyarakat. Efek lain dari perkembangan kebudayaan seperti ini adalah cara hidup yang lebih memberi penekanan pada memperindah kehidupan kebangsawannya dengan romantisme masa lalu lewat berbagai tradisi ritual kehidupan yang dihiasi dengan berbagai keindahan dan kemuliaan. Mereka membangun kebudayaannya dengan berpaling dari dunia luar, membalik kedalam dan semata-mata hanya mempertinggi dan memperluas kehidupan kraton. Dan semua karakter kebudayaan itu mampu menjalin masyarakat dengan bangsawannya tanpa harus menafikkan konsepsi mereka tentang alam. Semuanya terangkai dalam kebudayaan yang menjadi corak hidup seluruh kaum bangsawan sekaligus memberi arah kepada seluruh masyarakat Jawa karena kaum bangsawan ternyata juga mampu mengkonstruksi diri mereka untuk dijadikan panutan. Sehingga segala bentuk kepatuhan masyarakat adalah bentuk-bentuk ritual kehidupan yang mempunyai makna sakral dan suci.

Masih dalam kerangka kebudayaan tersebut, bahasa Jawa pun mengalami pergeseran dari bahasa yang sederhana dengan bentuk hubungan tinggi-rendah, sedikit dalam bentuk dan pilihan kata, dalam prakteknya pun tidak mempunyai kemutlakan karena memang kerangka feodalisme sebelumnya jauh lebih sederhana sehingga derajat kebangsawanaan tidaklah begitu luas. Hal itu minimal akan tampak dalam bahasa yang tidak menekankan keteraturan, kurang maju dan tidak memberi prioritas pada sisi keindahan. Namun selepas bangunan feodalisme lama tumbang dan karakter kebangsawanan baru, tumbuh seiring dengan tidak tumbuhnya kelas menengah sebagai kelas pedagang dan penyeimbang ini, merubah bahasa Jawa ke dalam berbagai macam bentuk, perbedaan dalam kata-kata dengan berbagai sinonim yang halus dan penuh kehormatan. Dari sinilah

kesusasteraan Jawa baru dideklarasikan sebagai efek dari kebudayaan Hindu yang telah lama tumbang dan sisa-sisa kekuatan Islam yang masih memberi pengaruhnya untuk kemudian menegakkan keberadaan feodalisme baru. Disamping itu terdapat juga perangkat kebudayaan lain seperti wayang yang mengalami kemajuan dengan pesat, seni batik ataupun kerajinan tangan yang semuanya mempunyai aspek memuliakan kaum bangsawan atau semangat sopan santun dalam kehormatan masyarakat yang terdeferensiasi ke dalam struktur yang feodal, yang penuh dengan rasa keterikatan dari sejarah, tradisi, nilai-nilai keagamaan. Hal itu tergambar dari adat-istiadat yang ada dan dijadikan referensi sekaligus tolak ukur perilaku masyarakat dalam kesehariannya (Budiono Herusatoto, *Op. Cit.* : 38-39).

Namun, hubungan yang harmonis antara Islam dan otoritas tradisional tidaklah eksis dalam waktu yang relatif lama, apalagi kaum kolonial yang pada akhirnya menempatkan karakter tradisional sebagai faktor dominan untuk melakukan mediasi terhadap kekuatan Islam yang telah mapan dan bergerak pada karakter Islam yang progresif. Akhirnya, formasi sosial kembali berubah menjadi Jawa-Islam dengan kaum kolonial yang telah beradaptasi dengan Jawa, tentunya tetap dalam ketidakseimbangan hubungan antar kebudayaan tersebut. Selepas kedatangan kaum kolonial yang mampu merubah orientasi kebudayaan di istana menjadi sekedar mengungkapkan etos kebangsawanan yang semakin tidak relevan dengan masa damai, tetapi juga etos yang ikut menyenangkan dan berfaedah bagi kaum kolonial. Karena memang menjadi agenda bagi mereka untuk memanfaatkan penguasa tradisional, bagi kepentingan otoritas mereka agar tetap eksis di Jawa (Riklefs, 1998 : 193-199). Pada saat itu kaum kolonial mencoba meliberalkan politiknya dalam masyarakat dengan meminimalisir peran bangsawan keraton (lewat

penghapusan berbagai simbol elit feodal) sekaligus menanamkan semangat baru bagi generasi muda di Jawa. Salah satunya lewat pendidikan, yang berakibat pada terbukanya peluang untuk mengalami mobilitas struktural. Semisal peran Bupati sebagai media kolonial (terkait dengan administrasi modern) untuk tetap menjaga jarak dengan kaum feodal pada akhirnya menempatkan para Bupati tersebut pada posisi kaum feodal baru. Kaum terdidik itu pada akhirnya mampu menjadi priyai-priyai baru, yang mereka dapatkan karena kemampuan mereka secara pribadi dalam dunia akademis. Dan merekalah yang kemudian menjadi tulang punggung bagi kaum kolonial dari Belanda hingga Jepang. Mereka sangat signifikan terhadap dalam proses administrasi modern kaum kolonial untuk tetap menjalankan roda pemerintahan kolonial di nusantara. Pada saat yang sama, kaum bangsawan yang mendapatkan otoritasnya lewat keturunan mengalami degradasi peran luar biasa oleh sebab kebijakan kaum kolonial tersebut. Kekuasaan, prestise dan kepercayaan diri kaum elit bangsawan mencapai titik yang terendah bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Oleh Sartono Kartodirjo (Hans Antlov, 2001 : 30-45) ditambahkan beberapa penyebab terjadinya perubahan di Jawa, terutama berkaitan dengan mundurnya aristokrasi adalah dengan maraknya kaum kolonial membangun sistem ekonomi baru yaitu agro-industri yang diikuti oleh perkembangan komunikasi, transportasi dan pendidikan, yang secara otomatis merubah juga karakter masyarakatnya (dari masyarakat agraris menjadi masyarakat semi industri) yang juga diikuti dengan munculnya ekonomi pasar, yang sejalan dengan lahirnya re-stratifikasi dengan munculnya kelas-kelas baru yaitu kaum terdidik. Dan apa yang terjadi di Jawapun, sebenarnya juga terjadi dibelahan dunia yang lain, dimana proses perubahan masyarakatnya mengambil jalur dari tradisional ke

peralihan dan pada akhirnya menuju modernisasi yang kompleks namun dengan skala perubahan yang berbeda-beda. Dengan mengambil indikator modernisasi pada jumlah penduduk, proses urbanisasi, keberhasilan dunia pendidikan modern, media-media komunikasi dan transportasi serta dampaknya secara sosiologis, juga dipaparkan dalam memudarnya masyarakat tradisional : suatu laporan oleh Daniel Lerner (1983 : 60-90).

Munculnya sistem ekonomi baru sebagai akibat dari proses transisional tersebut, berakibat pada semakin tidak kuatnya masyarakat tradisional untuk mempertahankan eksistensi mereka dan bangunan masyarakat baru dan modern (*nation*) makin tak terbendung proses persebarannya, karena generasi baru dari tiap masyarakat akan selalu membutuhkan identitas. Negara-lah struktur modern yang merupakan kunci bagi semua struktur kapitalisme lokal yang mulai melembaga. Dengan negara, masyarakat baru mampu menciptakan perangkat-perangkatnya dan salah satunya adalah hukum. Dan hukum-lah yang menempatkan negara dalam sebuah prosesi bermasyarakat yang bersifat legal yang berarti awal dari keruntuhan feodalisme dan patrimonialisme. Sistem dalam negara menyediakan perangkat-perangkat modern melalui sistem hukum yang bersifat universal dan rasional. Dan ditambahkan oleh Collin Randall -ketika menjelaskan perspektif Weber tentang kapitalisme dan modernitas- bahwa awal dari proses tersebut adalah terbentuknya kota-kota yang dinamis, modern dan orientasi berpikirnya rasional-ekonomis (Stephen K Sandersons, 2000 : 180-183). Monopoli kaum kolonial dalam sistem ekonomi baru yang mereka kembangkan pada akhirnya menjadi variabel penting dalam mengakselerasi dinamika masyarakat dan pertumbuhan kota-kota baru karena mulai terdesentralisasinya beberapa perangkat agro-industri kolonial. Sistem ini melahirkan perusahaan-perusahaan besar yang mendinamisir pembangunan kota-kota di Jawa, entah dalam bentuk

meningkatkan perdagangan dan proses industrialisasi yang berimplikasi juga pada urbanisasi di kota-kota yang mengalami proses tersebut. Oleh Wertheim (*Op. Cit.* : 138-149) proses tersebut, pada tahun-tahun berikutnya melahirkan banyak permasalahan yang mesti ditanggung oleh individu-individu yang ada, baik itu dalam bentuk segregasi, urbanisasi yang berlebihan hingga disintegrasi budaya akibat tidak langsung dari adanya pertukaran barang dan jasa secara besar-besaran di kota. Dalam perspektif sosiologis, aktivitas pertukaran dalam masyarakat bukanlah aktivitas ekonomis belaka namun sebagaimana yang diungkap Granovetter, yaitu aktivitas yang didalamnya terkandung aktivitas-aktivitas dan nilai-nilai sosial (Robert W Hafner, 1999 : 18).

Terakhir, penting untuk ditambahkan yaitu pemaknaan individu terhadap semua proses transisional masyarakat tersebut, yang mana individu menjadi bagian dari proses yang sedang berjalan. Dan diantara berbagai proses perubahan tersebut (Zdenek Suda, 1989 : 199-225), modernisasi menjadi lokus yang paling dinamis sekaligus memberi dampak paling kompleks bagi individu. Karena modernisasi (dengan relativitas-waktunya) yang dengan-nya berbagai unsur struktur budaya dan sosial, muncul dan lenyap atau diganti oleh unsur-unsur yang lain. Semua fakta tersebut adakalanya ditempatkan pada posisi yang obyektif, karena terkait dengan perubahan yang dialami oleh perangkat-perangkat teknologi atau sosial pada kurun waktu tertentu. Namun adakalanya perubahan juga dilihat sebagai perubahan yang subyektif-relatif, dengan menempatkan individu sebagai aktor yang berhadapan dengan berbagai dinamika teknologi dan perangkat sosial yang ada sekaligus jauh lebih beragam konsekuensinya bagi individu-individu dalam masyarakat.

Dalam penelitian yang mengambil Kauman sebagai lokasi penelitian. Menempatkan Kauman sebagai sebuah kota yang dibangun atas dasar tuntutan sosio-politis masyarakat

Jawa pada masa lalu, memberikan berbagai gambaran yang amat banyak terhadap perkembangan kota pada era aristokratis dan feodalisme yang mengalami kemapanannya di Jawa. Keberadaan Kauman sendiri berawal dari konsepsi Paku Buwono II (1757) yang membangun kraton Surakarta di Sala dengan berbagai perlengkapan yang menyertai keberadaan kraton, seperti masjid Agung, alun-alun ataupun benteng-benteng peperangan. Kauman sendiri masih dalam wilayah *Bumi Pamethakan* (wilayah yang otoritasnya dipegang penuh oleh keraton) sebagai tempat tinggal para abdi dalem yang beragama Islam dan diberi tugas oleh kerajaan untuk mengurus makam-makam yang dihormati, masjid atau tempat-tempat yang dianggap sakral, yang diatur langsung oleh *Reh Pengulon* (administrasi keraton yang mengurus masalah-masalah keagamaan). Kata Kauman sendiri berasal dari kata *Qoum-Muddin* (bhs. Arab) yang berarti penegak agama Islam.

Dalam kerangka inilah Kauman dapat digambarkan sebagai representasi dari terintegrasinya karakter politik tradisional dengan agama dalam sebuah sistem sosial budaya yang khas. Sehingga pemaknaan akan Kauman sebagai masyarakat Islam tradisional diletakkan dalam sebuah bingkai masyarakat yang beragama Islam, yang dipengaruhi oleh otoritas tradisional peninggalan Hindu-Budha dan melahirkan berbagai pola kebudayaan yang mengadopsi nilai-nilai Islam-Hindu-Budha dan dikemas dalam otoritas feodalisme Jawa yaitu kraton Surakarta. Dengan pola pembentukannya yang khas yaitu seleksi atas dasar agama menjadikan perkembangan kota ini linear dengan pola pembentukannya diawal keberadaan Kauman. Kontinuitas ini, menjadi hal yang menarik ketika kita hendak melihatnya pada kerangka perubahan dengan melakukan

komparasi antara kondisi awal keberadaan Kauman dengan kondisi kekinian di Kauman karena berbagai agenda modernisasi tersebut.

Agenda modernisasi sendiri ada seiring dengan keberadaan otoritas modern yaitu negara. Keberadaan negara yang mempunyai jaring-jaring kekuasaan pada wilayah yang paling kecil sekalipun, pada akhirnya menghadap-hadapkan antara kraton (sebagai otoritas tradisional) dengan pemerintah daerah (sebagai wakil dari otoritas modern) *vis to vis* dalam ruang-ruang kebudayaan. Agenda pengembangan kota Surakarta yang menempatkan Kauman sebagai bagian dari kota Surakarta yang sedang bergerak ke arah modernisasi, dengan melakukan berbagai perubahan dalam setiap bidang kehidupan memberi dampak tersendiri terhadap Kauman. Perubahan yang dialami oleh Kauman adalah sebuah potret sederhana tentang kecenderungan memudarnya kekuatan tradisi, ketika harus dihadapkan pada gerak perubahan yang sangat dinamis dan perubahan yang terjadi di Kauman tidak bisa lepas dari perubahan yang dialami oleh individu-individu di dalamnya. Perubahan Kauman dalam dimensi ekonomi, budaya, sistem nilai hingga perubahan pada aspek fisik, menyeret individu untuk juga memahami dan mengikuti proses tersebut. Penelitian ini akan melihat prosesi perubahan di Kauman, sejauh yang telah terjadi hingga sekarang dan menyoroti dinamika individu-individu yang ada didalamnya dalam menghadapi prosesi perubahan tersebut.

Titik tolak dari pembahasan ini adalah tentang pola dan proses perubahan yang menempatkan subyek sebagai pengambil keputusan dalam berbagai interaksi mereka sehari-hari. Pengambilan keputusan merupakan proses memilih suatu rangkaian tindakan dari dua atau lebih alternatif. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data (akan

realitas), penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat dan cepat.

Sesuatu keputusan diambil untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kiranya telah disadari bahwa pelaksanaan keputusan tidak pernah terjadi dalam suasana kekosongan. Artinya terdapat kekuatan yang selalu mempengaruhi sesuatu keputusan yang diambil. Kekuatan-kekuatan itu adalah:

1. Dinamika individu.

Hal ini berkait dengan sikap dan tingkah laku yang dilakukan seseorang dalam keadaan tertentu. Sikap dan tingkah laku ini dapat diketahui dengan terlebih dahulu mengetahui pandangan seseorang tersebut terhadap dirinya sendiri. Pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri biasanya merupakan sintesis dari aspirasi, pendidikan, pengalaman dan penilaian orang-orang sekelingnya kepadanya. Seseorang mengambil keputusan selaku individu untuk melindungi atau memperbesar pandangannya terhadap dirinya.

2. Dinamika lingkungan.

Semua kondisi dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi suatu keputusan termasuk ke dalam kategori lingkungan. Setiap keputusan mempunyai lingkungan sendiri yang khas. Dalam arti yang sesungguhnya semua keputusan harus taat pada tekanan-tekanan yang bersumber dari lingkungan. Tentunya merupakan suatu harapan pula supaya keputusan yang diambil merubah lingkungannya sebagai sebuah kekuatan yang mempengaruhi proses dan teknik pengambilan keputusan. Lingkungan di sini termasuk kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Pengambilan keputusan didasarkan kepada satu skala prioritas yang rapi dan berencana, oleh karena itu pada tingkat dan ruang lingkup masing-masing, keputusan-keputusan yang diambil berbeda dalam penting atau tidaknya suatu keputusan ini tidak berdiri sendiri. Keputusan yang penting misalnya, merupakan suatu sumber yang akan menimbulkan reaksi berantai dan akan diikuti oleh keputusan-keputusan lain. Dengan perkataan lain bahwa suatu keputusan hanya merupakan suatu titik dalam mata rantai waktu. Sekali keputusan diambil, segera timbul perubahan dalam lingkungan keputusan tersebut. Hadirnya selalu kekuatan-kekuatan pengubah dalam lingkungan memaksakan adanya usaha yang terus menerus untuk memperbarui keputusan dan tindakan.

Dan ini berarti tindakan mereka mempunyai arti atau bermakna. Konsep tindakan yang bermakna dan penuh arti dapat kita temukan dalam paradigma definisi sosial (*Social Defenition Paradigm*). Dalam paradigma ini terkandung dua konsep dasar yaitu konsep tindakan sosial dan konsep tentang penafsiran atau pemahaman. Tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Menurut Weber, tindakan sosial dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, dapat bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.

Untuk mempelajari tindakan sosial adalah dengan metode penafsiran dan pemahaman, yang menurut terminologi Weber adalah *verstehen*, yaitu suatu upaya untuk menginterpretasikan tindakan si aktor dengan memahami motif dari tindakan yang dilakukannya.

Salah satu teori yang sepenuhnya berawal dari karya Weber adalah teori aksi (*action theory*). Asumsi-asumsi fundamental dari teori ini sebagaimana dikemukakan oleh Hinkle dengan merujuk karya Mac Iver, Znaniecki dan Parsons sebagai berikut:

1. Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek.
2. Sebagai obyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, prosedur metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya.
5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya.
6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.
7. Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subyektif seperti metode verstehen, imajinasi, sympathetic atau seakan-akan mengalami sendiri (*vicarious experience*).

Menurut Cooley, sesuatu yang mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah apa yang disebutnya sebagai "kesadaran subyektif" dan hal ini merupakan pengakuan terhadap sifat aktif dan kreatif individu. Selain kesadaran subyektif, perasaan-perasaan individual, sentiments dan ide-ide merupakan faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berinisiatif atau mengakhiri tindakannya terhadap orang lain.

Sedangkan menurut Parsons - seorang pengikut Weber yang mengembangkan teori aksi - sejak semula telah menjelaskan bahwa teori aksi tidak dapat menerangkan keseluruhan aspek kehidupan sosial. Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Adanya individu sebagai aktor.
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya.
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.
5. Aktor berada dibawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan (George Ritzer, 1992 : 45-74).

Aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat. Tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih, yang menurut terminologi Parsons disebut "*voluntarism*". Singkatnya voluntarism adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya. Berbagai tujuan yang hendak dicapai, kondisi dan norma serta situasi penting lainnya kesemuanya membatasi kebebasan aktor. Tetapi disamping itu, aktor adalah manusia yang aktif, kreatif dan evaluatif.

## **F. METODOLOGI PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-eksploratif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Dimana aspek subyektif dari perilaku obyek akan menjadi penekanan dalam penggalian informasi yang dibutuhkan. Pemahaman akan dunia konseptual dari obyek akan coba dipahami sedemikian rupa sehingga akan didapatkan berbagai pemahaman atau pengertian yang dikembangkan oleh individu, pada berbagai peristiwa yang mereka hadapi dan pada perilaku yang mereka lakukan. Agenda untuk menangkap proses penafsiran individu atas realitas yang ada disekitarnya akan menjadi alat untuk kemudian menangkap makna dari perilaku individu-individu (Robert Bogdan & Steven Taylor, 1993 : 45).

### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kauman, yaitu sebuah kelurahan di kota Surakarta, Jawa Tengah. Alasan utama pemilihan lokasi ini terkait dengan representasinya Kauman sebagai wakil dari gambaran peneliti di latar belakang masalah, dimana Kauman (sampai sekarang) masih menjadi bagian dari otoritas keraton Surakarta yang sangat kental dengan berbagai agenda keraton yang bersifat tradisional dan bernuansakan Islam. Disamping juga berbagai agenda yang dilakukan oleh pemerintah kota, yang terus mulai membangun berbagai fasilitas modern disekitar keraton dan Kauman. Sehingga tarik ulur antara bangunan kebudayaan tradisional untuk tetap eksis dengan berbagai aktivitas dan infra struktur modern yang tak terbendung, sangat terasa dampak dan dinamikanya pada dan didalam masyarakat Kauman. Dan studi terhadap

Kauman diharapkan mampu memberi penjelasan terhadap perubahan sosial yang ada di kota Surakarta.

### **c. Data dan Tehnik Pengumpulannya**

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, berupa data-data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan diperoleh lewat wawancara mendalam dengan informan di lapangan, terutama berkaitan dengan berbagai pemahaman individu (dalam bentuk pengalaman yang bersifat subyektif) terhadap dinamika disekitarnya. Karena pada unit individu adalah yang langsung menjadi partisipan dalam masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1991 : 158-172). Dengan masyarakat Kauman yang menjadi populasi secara keseluruhan maka peneliti menggunakan tehnik pengambilan sampel dengan tehnik *purposive*. Tehnik ini digunakan dengan syarat-syarat pengambilan sampel harus didasarkan atas karakteristik sampel tertentu yang memenuhi ciri pokok populasi, subyek yang diambil merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi (*key subject*) sekaligus memberi banyak informasi berkaitan dengan kebutuhan peneliti. Disamping tehnik ini, peneliti juga menggunakan tehnik *snow ball* yaitu dengan menggulirkan sample atas dasar informasi yang telah didapatkan sebelumnya, untuk membangaun kerangka informasi bagi peneliti. Dengan memgkombinasikan dua tehnik pengambilan sampel ini, peneliti berharap dapat menggali informasi berkaitan dengan kebutuhan peneliti secara maksimal. Pada bentuk data ini, peneliti membuat pemetaan informan menjadi, penduduk asli Kauman, pendatang tetap dan pendatang tidak tetap di Kauman. Untuk kemudian dikombinasikan dengan berbagai informasi yang diperoleh dari teks-teks yang ada, yang memberikan gambaran tentang otoritas di Kauman pada masa silam. Dengan format seperti ini, wawancara sebagai sebuah proses pencarian

data dapat diinteraktifkan dan dikonfirmasi satu dengan lainnya (Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 1981 : 145).

Kemudian data sekunder yang peneliti gali dari berbagai tehnik observasi untuk melihat setiap aktivitas individu dan masyarakat Kauman. Sebab setiap aktivitas dalam masyarakat adalah gejala dari eksistensi realitas yang sedang dan terus dikonstruksi oleh individu dalam posisinya sebagai anggota masyarakat. Dan setiap gejala akan punya arti dan bermakna bagi individu (Harsja W Bachtiar, *ibid* Koentjaraningrat, 1991 : 108-128).

Dengan target seperti yang diatas, peneliti telah mengalokasikan waktu untuk mengikuti berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kesehariannya ( dengan *life in*). Karena dengan interaksi yang intensif (*partisipan observation*) antara peneliti dengan masyarakat yang diteliti, diharapkan akan didapati berbagai pemaknaan individu yang bersifat natural (Robert Bogdan & Steven J Taylor, 1993 : 31-34). Disamping juga dari literatur yang berkaitan dengan data-data monografi yang menggambarkan dinamika demografis masyarakat untuk dijadikan data-data pendukung agar memaksimalkan usaha peneliti.

#### **d. Analisis dan Validitas Data**

Analisis data pada umumnya, adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian yang bertujuan memberi penjelasan. Dalam bahasa lain, digambarkan sebagai proses yang memerinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis sesuai dengan apa yang digambarkan oleh data yang diperoleh. Dengan tahap ini data diolah sedemikian rupa dengan tujuan untuk menggambarkan suatu keadaan dengan jelas dan tepat (Lexy

Moeloeng, 1999 : 103). Usaha menggambarkan keadaan suatu masyarakat dengan jelas dan tepat, memerlukan tahap-tahap yang harus dilalui, yaitu : mengumpulkan data, menyusunnya ke dalam kategori-kategori dan menyatakan berbagai sifat dari kategori-kategori tersebut. Tentang kategori-kategori dan sifat-sifatnya, maka ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Kategori-kategori dan sifat-sifatnya merupakan dasar utama untuk analisis. Kategori dan sifatnya dipakai untuk menggambarkan dan memberikan batasan pada data. Hubungan antar kategori-kategori dengan berbagai sifat-sifatnya, yang disebut hipotesis, merupakan pedoman atas penelitian berikutnya karena satu kategori menunjukkan kategori yang lain, analisis dari satu kategori mengarah untuk menetapkan kategori yang lain.
2. Kategori-kategori didasarkan pada data penelitian. Teori dan semua unsur-unsurnya harus muncul dari penelitian, bukan dirumuskan terlebih dahulu sebelumnya. Sehingga seluruh analisis di dasarkan pada data penelitian, dan bukan gagasan-gagasan yang ditetapkan sebelumnya.
3. Pengumpulan data dan analisis data berlangsung pada waktu yang bersamaan. Dengan mengumpulkan data kemudian mengklasifikasikannya, dan yang telah dipelajari sebelumnya langsung merupakan pedoman pada apa yang masih harus dikumpulkan dan pedoman dimana data itu harus dicari. Sehingga pengumpulan data didasarkan pada pengembangan analisis (Lexy Moleong, *Ibid* : 190-196).

Langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis-hipotesis. Hipotesis adalah hubungan-hubungan yang mungkin terjadi diantara kategori-kategori dengan berbagai sifat-sifatnya,

yang kesemuanya lahir dari data-data penelitian. Untuk menampakkan suatu kerangka yang menyeluruh maka kategori-kategori dan hipotesis-hipotesis dianalisis lebih mendalam, sehingga akan kelihatan kait mengkait antar kategori-kategori dan hipotesis-hipotesis. Inilah inti yang dikembangkan. Inti ini merupakan pedoman atau kunci pada langkah terakhir dari pengumpulan data, dimana peluang di dalam uraian dan teori mulai dapat diisi (Robert Bodgan & Steven Taylor, *Op. Cit.* : 131-152)

Kemudian untuk memperoleh data yang kredibel dan valid, cara yang ditempuh peneliti adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (diluar data itu) untuk keperluan pengecekan atau sekedar pembanding terhadap data tersebut. Alternatif triangulasi yang mungkin digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah :

1. *Data triangulation*, dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang sama.
2. *Methodological triangulation* adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.
3. *Theoretical triangulasi* adalah melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisis dengan menggunakan beberapa perspektif teoritis yang berbeda (Lexy Moleong, *Op. Cit.* : 178-179).

Dalam penelitian ini tidak semua cara/macam triangulasi digunakan untuk mencari keabsahan data, semuanya akan mempertimbangkan kebutuhan dilapangan.

## H. METODE PENELITIAN

Pada awal penelitian ini, peneliti melakukan observasi dasar sambil sesekali mewawancarai beberapa orang yang dapat peneliti temui dilapangan. Sambil tetap mengkaji banyak bahan yang terkait dan mendiskusikannya dengan beberapa pihak yang berkompeten dengan lokasi dan tema yang peneliti minati. Hal ini terasa penting, untuk menentukan tema dan arah penelitian ini dirancang. Selepas observasi awal, peneliti mencoba membuat rancangan aktivitas penelitian dilapangan. Dari situ peneliti memulai tahap-tahap penelitian dan tahapan tersebut adalah :

**Pertama** yang peneliti lakukan adalah mencari tempat untuk bisa menetap (*live in*) di lapangan, harapan peneliti adalah untuk memudahkan proses penelitian selanjutnya. Di lapangan penelitian sendiri ternyata banyak alternatif tempat untuk bisa ditinggali oleh pendatang. Entah itu berupa pondok pesantren (tempat yang berada dalam lokasi Masjid Agung dan berorientasi untuk memberi tempat bagi mereka yang hendak menuntut ilmu keagamaan yang diadakan oleh lembaga tersebut), home stay (tempat yang disediakan bagi para pendatang untuk menetap sementara waktu dalam jangka waktu satu minggu hingga satu bulan dan biasanya kepemilikannya bersifat individual dengan tempat relatif luas) ataupun kost-kost-an (yaitu tempat yang disediakan bagi para pendatang yang bertujuan untuk tinggal dalam jangka waktu yang relatif lama dan sekalipun kepemilikannya bersifat pribadi namun relatif lebih kecil bila dibanding dengan rumah yang dijadikan home stay).

Akhirnya peneliti memilih bertempat tinggal di sebuah kost-kost-an di Jalan Wijaya Kusuma III No. 23 Rt. 01 Rw. 04 Kauman. Dengan pertimbangan beberapa hal, beberapa diantaranya adalah *pertama* dekat dengan sebuah langgar (tempat ibadah bagi

orang beragama Islam) dari kondisi itu berarti peneliti akan dekat dengan aktivitas publik. Artinya di langgar tersebut, peneliti akan bertemu dengan banyak orang ketika menunaikan kewajiban keagamanya sehari-hari disamping juga sebagai tempat untuk berkumpul pada moment tertentu oleh warga sekitarnya. Yang *kedua*, dengan bertempat tinggal di kost-kost-an peneliti secara tidak langsung dapat memahami aktivitas para pendatang yang tinggal bersama peneliti. Dan yang *ketiga*, yang sekaligus strategis bagi peneliti adalah pemilik dari tempat yang peneliti tinggali adalah tokoh masyarakat (ulama ; orang yang paham agama Islam) sehingga banyak membantu peneliti dalam penempatan diri dalam proses sosialisasi di lapangan.

**Kedua**, untuk tahap ini peneliti melakukannya dalam prosesi yang relatif lama yaitu pengamatan sehari-hari di Kauman. Di sini peneliti menghabiskan waktu relatif paling lama untuk melakukan pengamatan (sebagai salah satu tehnik pengambilan data) terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh obyek penelitian di lapangan (observasi mendalam I). Tehnik yang peneliti lakukan adalah proses pembauran dengan semua aktivitas yang ada, untuk kemudian peneliti dokumentasikan dalam catatan harian lapangan. Sambil terus untuk membangun kerangka berpikir tentang realitas yang ada di lapangan. Bangunan-bangunan hipotesis tentang realitas yang peneliti hadapi selalu berubah-ubah sesuai dengan semakin banyaknya moment yang peneliti amati di lapangan.

Semua proses itu berjalan secara bertahap sesuai dengan proses sosialisasi yang peneliti lakukan agar tidak terasa janggal dengan realitas yang peneliti hadapi. Dan proses ini berjalan lancar karena peneliti memang secara khusus meminta bantuan seseorang yang oleh peneliti ditempatkan sebagai penerima di lapangan agar memudahkan hubungan yang peneliti miliki dengan obyek penelitian (*gate-keeper*). Jadi selama itu, proses yang

ada di lapangan hanyalah pengamatan lalu dokumentasi peneliti dalam bentuk catatan harian lapangan sambil tetap membuat rangkaian tipologi atas realitas dan hipotesis-hipotesis yang sifatnya sementara. Dan proses ini peneliti lewati sambil menyelesaikan kerangka kajian pustaka (proposal) yang peneliti telah buat sebelumnya.

Dari sini kemudian peneliti membuat *sampling frame* tentang individu-individu yang ada di Kauman. Yang mana, peneliti membaginya atas tiga kategori dasar yaitu penduduk asli Kauman ; dalam artian mereka adalah penduduk yang mempunyai garis keturunan dari mereka yang pernah menjadi *Abdi Dalem Pametakhan* ataupun mereka yang menjadi keturunan dari masyarakat yang datang karena bekerja menjadi tenaga kerja *Abdi Dalem Pametakhan* tersebut. Namun yang terakhir tidak peneliti menempatkan-nya secara khusus sebagai representasi dari masyarakat Kauman (dalam masa lalu-nya). Kemudian yang kedua adalah mereka yang telah menjadi penduduk Kauman dan menetap di Kauman. Kebanyakan mereka adalah pendatang yaang datang baik padaa saat Kauman masih dalam otoritas keraton ataupun mereka yang datang selepas aturan-aturan negara berlaku di Kauman. Namun dalaam prosesnya kedua-nya (mereka yang menjadi keturunan-yang bukan) tampak tidak ada perbedaan yang mendasar sebab keduanya kini adalah warga Kauman. Mereka sama-sama memiliki hak atas tanah di Kauman dan dengan bebas pula diperjual belikan.. Yang terasa berbeda adalah dengan kelompok ketiga yaitu warga yang terdapat di Kauman namun mereka tinggal di dalam Kauman karena adanya lapangan kerja ataupun mereka tinggal di Kauman dengan waktu yang relatif terbatas. Dengan menempati rumah-rumah yang dengan sengaja disewakan, mereka menjadi sumber daya manusia bagi berbagai kegiatan ekonomi yang terselenggara di Kauman ataupun sekitarnya. Dari situlah rangkaian data, bagi peneliti

mulai di telusuri dan dikonstruksi berbagai hipotesis tentang skema perubahan yang terjadi di Kauman.

Dari apa yang telah peneliti lakukan, ternyata berdampak pada apa yang peneliti rasakan sendiri bahwa setiap moment yang peneliti lewati bersama orang lain di lokasi penelitian adalah data yang tidak bisa diabaikan oleh peneliti.

**Ketiga**, yaitu tahap masuknya peneliti secara resmi kelapangan. Di tahap ini peneliti menyelesaikan berbagai prosedur resmi penelitian secara resmi, seperti halnya adalah masalah perijinan terkait dengan apa yang peneliti lakukan di lapangan.

**Keempat** adalah tahapan utama yaitu pengambilan data lewat wawancara dengan beberapa informan di lokasi penelitian (observasi mendalam II). Tahap ini berjalan maksimal setelah peneliti melalui tahap-tahap sebelumnya. Dimana peneliti punya berbagai kerangka pemikiran dari hasil pengamatan di lapangan yang telah peneliti lakukan sebelumnya, untuk kemudian dikonfirmasi dengan data yang peneliti peroleh dari wawancara pada tahap ini.

Namun dalam tahapan ini, peneliti membaginya dalam beberapa fase pengambilan data dalam bentuk wawancara. Hal ini dilakukan oleh peneliti berdasarkan apa yang peneliti kategorikan sebagai komposisi penduduk Kauman (sebagai hasil dari observasi mendalam I). Tapi fase-fase ini, tentunya mengalami banyak penyesuaian dilapangan untuk disesuaikan dengan semua data baru yang peneliti miliki.

a. Fase yang *pertama* adalah pengambilan data dalam bentuk wawancara dengan penduduk asli Kauman (*Abdi Dalem Pamethakan*) dan keturunannya (wawancara tahap I).

Dari data ini, peneliti membangun hipotesis awal tentang perubahan Kauman dalam kerangka obyek utama dari masyarakat Kauman asli.

b. Fase yang *kedua* adalah pemaksimalan hipotesis yang telah peneliti miliki dari hasil wawancara tahap I yang telah peneliti elaborasi dengan catatan lapangan hasil dari observasi mendalam I, peneliti melengkapinya dengan mengambil data dalam bentuk wawancara dengan penduduk Kauman yang menetap (mereka adalah penduduk yang menetap di Kauman selepas Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945-an dan mereka sudah beranak pinak ; wawancara tahap II). Dengan cara ini peneliti, menghasilkan apa yang peneliti butuhkan dari apa yang peneliti pertanyakan dalam perumusan masalah. Artinya hipotesis yang peneliti miliki sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, berdasarkan wawancara tahap I dan II.

c. Fase *refleksi* dari kondisi data yang peneliti miliki, maka peneliti mencoba mengambil tengat waktu untuk mencoba merefleksikan data yang peneliti ambil sebelumnya. Hal ini penting untuk membiarkan data-data yang ada dipaparkan secara baik dan dari situ akan terlihat lubang-lubang kekurangan yang peneliti miliki ketika melalui proses pengambilan data pada fase wawancara tahap I dan II. Sekaligus memberi kesempatan bagi peneliti untuk menyusun laporan sebagai tahap penulisan awal. Dan berdasarkan kondisi ini, peneliti juga membangun temuan-temuan untuk di follow up-i pada fase pengambilan data berikutnya.

d. Fase yang *keempat* adalah fase *triangulasi* . Fase ini bermula dari temuan. Dan ternyata informan yang dibutuhkan dalam fase ini adalah sekaligus masuk dalam kategori penduduk Kauman yang menetap dan beberapa diantaranya sekarang tinggal di luar Kauman.

e. Fase berikutnya yaitu yang *kelima* adalah tahapan untuk melengkapi data lapangan dengan mengulangi proses fase sebelumnya (tahap I dan II) yaitu pengambilan data dalam bentuk wawancara dengan penduduk asli Kauman dan penduduk menetap. Pada fase ini, peneliti mencoba untuk menutup lobang-lobang hipotesis (baru) yang peneliti miliki, yang merupakan hasil dari pengambilan data pada tahap I dan II sekaligus yang telah ditrianggulasi-kan. Dalam fase ini, agenda peneliti lebih pada melengkapi apa yang menjadi target dari peneliti yaitu temuan atas semua variabel yang terdapat di lapangan dan dengan penjelasan atas semua variabel tersebut.

Disamping itu juga peneliti menerima banyak bantuan dari berbagai pihak (baik itu Kepala Kelurahan atau beberapa figur tokoh masyarakat) yang memberi referensi bagi peneliti untuk selalu berani mengubah hipotesis yang peneliti miliki ataupun membantu untuk menyempurnakan kerangka berpikir peneliti.

**Kelima**, adalah tahap akhir dari fase penelitian ini yaitu penulisan laporan. Setelah semua proses yang telah peneliti lalui maka penulisan laporan menjadi tahap akhir dari agenda penelitian ini, tentunya tetap dengan menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang telah membantu peneliti melakukan penelitian di Kauman. Dan untuk tahap ini peneliti tetap akan merasa banyak kekurangan sehingga tetap membuka diri untuk kembali ke lapangan sebagai komitmen dari kekurangan tersebut, untuk kemudian benar-benar keluar dari lapangan dan menyelesaikan penelitian secara total.